PENGURUSAN PIUTANG NEGARA PADA KEMENTERIAN/LEMBAGA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA

(STUDI PADA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG MEDAN)

**NOVIDA HELEN BARIANG**

**NPM. 185114041**

**ABSTRAK**

Hukum perdata adalah serangkaian peraturan hukum yang mengatur hubungan subjek hukum (orang dan badan hukum) yang satu dengan subjek hukum yang lain dengan menitikberatkan pada kepentingan pribadi dari subjek hukum tersebut. Hukum perdata berlaku ketika timbul kesepakatan antara pihak-pihak yang membuat perjanjian. Ketika terjadi wanprestasi, pihak yang dirugikan dapat meminta ganti kerugian atas perjanjian yang tidak dilakukan. Penerapan hukum perdata tidak hanya terjadi pada antar perorangan, antar badan, atau badan dengan perorangan, tetapi juga terjadi pada pemerintahan. Pemerintahan, yang diwakili oleh Kementerian/Lembaga, melakukan kesepakatan dengan orang maupun badan. Kegiatan yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga berguna untuk memperoleh Penerimaan Negara Bukan Pajak. Namun, transaksi yang terjadi memungkinkan terjadinya wanprestasi sehingga perlu dilakukan upaya untuk melakukan penagihan. Piutang negara merupakan uang atau dalam bentuk apapun yang harus dibayarkan oleh debitur. Jika tidak dapat dibayar, Kementerian/Lembaga harus mengupayakan penagihan piutang tersebut karena piutang negara merupakan hak negara. Penagihan piutang negara melalui serangkaian proses dan hambatan. Penelitian dilakukan dengan metode kualtiatif di mana penulis langungs melakukan observasi dan wawancara kepada pejabat erkait di KPKNL Medan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara piutang negara dengan hukum perdata karena terlahir dari adanya perjanjian dan akibat yang ditimbulkan dari wanprestasi adalah hak kreditur untuk meminta ganti kerugian.

*Kata kunci: piutang negara, hukum perdata, perjanjian, wanprestasi, proses penagihan, hambatan penagihan*

**MANAGEMENT OF STATE RECEIVABLES AT MINISTRY/INSTITUTIONS IN CIVIL LAW PERSPECTIVE**

**(STUDY ON STATE PROPERTY SERVICE OFFICE AND FIELD AUCTION)**

**NOVIDA HELEN BARIANG**

**NPM. 185114041**

***ABSTRACT***

*Civil law is a set of legal regulations that regulate the relationship of one legal subject (person and legal entity) with another legal subject by emphasizing the personal interests of that legal subject. Civil law applies when an agreement arises between the parties to the agreement. In the event of a default, the aggrieved party may seek damages for the agreement that was not performed. The application of civil law does not only occur between individuals, between bodies, or bodies with individuals, but also occurs in government. The government, represented by ministries/agencies, makes agreements with persons and agencies. The activities carried out by the Ministry / Institution is useful for obtaining Non-Tax State Revenue. However, the transaction that occurs allows for default so it is necessary to make efforts to make a collection. State receivables are money or in any form that must be paid by the debtor. If it cannot be paid, the Ministry/Institution must seek collection of the receivables because state receivables are the right of the state. Collection of state receivables was through a series of processes and barriers. The research was conducted using a quality method in which the author directly conducted observations and interviews with officials related to the KPKNL Medan. The results showed that there was a relationship between state receivables and civil law because it was born from an agreement and the consequences arising from default were the right of creditors to seek compensation.*

*Keywords: state receivables, civil law, agreements, defaults, billing process, billing barriers*